# BAB IV

# PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

## A. Partisipasi Perempuan Dalam Konteks Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Dalam Program Jalin Matra, Di Desa Rebono Kab. Pasuruan.

Partisipasi dalam KBBI adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, atau peran serta. Partispasi perempuan dalam perumusan kebijakan berdampingan dengan proses pemberdayaan perempuan yang merupakan proses peningkatan kapasitas seseorang untuk menentukan pilihannya. Dalam hal ini, partisipasi perempuan dalam kegiatan Jalin Matra di Desa Rebono Kabupaten Pasuruan ditunjukkan dengan pengambilan keputusan di tingkat Stakeholder dilakukan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalian masalah lewat dialog dan tukar pengalaman diantara warga (*partisipatoris deliberatif*). "Rembug Warga" menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan dan pemetaan awal kondisi RTS (Rumah Tangga Sasaran) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual. Dalam ungkapan Ibu Sumaidah selaku perangkat Desa Rebono bahwa:[1]

> "rembug warga dihadiri oleh: Sekretariat Desa, Pendamping Desa, KRTP, Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan".

[1] Sumaidah, Wawancara dirumahnya, Pada tanggal 19 Januari 2017, Pukul 09.15 WIB sampai selesai.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumaidah bahwa dalam kegiatan Rembug Warga, Pengambilan keputusan tentang jenis usulan kebutuhan melibatkan partisipasi aktif rumah tangga sasaran dengan mengajak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan meningkatkan taraf hidup. Pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*) manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris KRTP untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dalam ungkapan Ibu Sumaidah selaku perangkat desa rebono bahwa:[2]

> "Pertama kali diadakan pendataan pada tahun 2014, di verifikasi apakah orang yang akan mendapatkan bantuan atau rumah tangga sasaran ini benar-benar miskin atau janda, sama ada penyuluhan terkait dengan dana bantuan yang akan diterima nantinya. Bahwa bantuan yang akan diterima berupa modal usaha, jadi setiap RTS akan ditanyakan nantinya akan membuka usaha apa, dalam pendataan ini juga ada dokumentasi yang nantinya akan dikirim ke Pemerintah Provinsi. Kendalanya disini bagi RTS yang tidak bisa membuka usaha, solusi dari pemerintah desa ditanyakan bisanya apa, Bisanya RTS tersebut bertenak kambing, jadi dana bantuannya di rupakan kambing".

Sudah tentu bukan jalan yang mudah untuk memberikan tempat kepada perempuan, karena mereka harus mengejar ketertinggalan yang demikian jauh dari laki-laki dalam dunia politik.[3] Seringkali perempuan membentuk suatu organisasi untuk mendapat legitimasi hukum dan pengaruh

---

[2] Sumaidah, Wawancara dirumahnya, Pada tanggal 19 Januari 2017, Pukul 09.30 WIB sampai selesai.

[3] Yayasan Cakrawala Timur, "*Partisipasi Politik Perempuan dalam Proses Pembentuk Kebijakan di Daerah Jawa Timur*", Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publik. Dengan demikian partisipasi mereka dalam sistem politik tercapai. Pada masa kini, kaum perempuan dunia ini bukanlah bagian masyarakat yang tak terlihat atau tak terdengar lagi karena gerakan perempuan mengalami globalisasi. Studi perempuan mengambil peranan penting untuk menyediakan dan menyerahkan informasi tentang keadaan perempuan dari berbagai aspek kehidupan sehingga masalah-masalah dapat diperkenalkan dan kebijakan atau hukum diperbaiki.[4]

Dalam kondisi permasalahan dan kemiskinan yang dihadapi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan secara umum lebih kronis dibanding dengan kepala rumah tangga laki-laki. KRTP tidak hanya mengalami permasalahan disektor ekonomi, tetapi juga problematika psikologis, sosial, dan budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari perangkap kemiskinan tidak cukup melalui fasilitas akses ekonomi tetapi memerlukan dukungan interaksi secara intensif dari "figur" yang secara keseharian sudah dikenal, dinilai mampu memberikan perlindungan, berkelanjutan, serta memiliki legitimasi sosial. Figur tersebut yang selanjutnya menjadi "*mother care*" atau baiknya sebagai sosok ibu atau orang tua yang memiliki kepedulian yang tinggi, menjadi simpul interaksi dan berbagi antar KRTP sehingga akan memupuk harapan serta semangat untuk

[4] Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *PEREMPUAN, KERJA dan PERUBAHAN SOSIAL (Sebuah Pengantar Studi Perempuan)*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997). 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan kebutuhan tersebut Kader dari Tim Penggerak PKK adalah figur yang tepat untuk berposisi sebagai "*mother care*" bagi KRTP. Gerakan PKK merupakan gerakan Nasional dalam Pembangunan Masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Jejaring PKK dapat menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsung, karena telah terbentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma. Sehingga melalui optimalisasi TP-PKK dalam jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan diharapkan dapat benar-benar secara riil memecahkan permasalahan problematika kemiskinan yang berwajah perempuan di tingkat keluarga. Menurut perkataannya Ibu Surni selaku Ketua PKK desa rebono bahwasannya:[5]

> "fenomenanya di lapangan, untuk yang dari anggota PKK kan gak ikut nimbrung, cuma anggota PKK disini sebagai Pembina tok. Kenapa PKK dilibatkan, karena basik program ini kan perempuan, sedangkan pelaksana operasional yang kelapangan itu pendamping desa. PKK disini cuma sekedar mengawasi".

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Surni bahwasannya pada saat terjun ke lapangan anggota PKK Desa Rebono tidak ikut campur, hanya saja anggota PKK Desa cuma sebagai pengawas jalannya kegiatan tersebut. Sedangkan yang turun serta aktif di lapangan yaitu Pendamping Desa. Tenaga

[5] Surni, Wawancara dirumahnya, Pada tanggal 20 Januari 2017, Pukul 13.40 WIB sampai selesai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendamping Desa dalam hal ini dibantu oleh tenaga Pendamping dari Kabupaten. Menurut pemaparan dari Mbak Nafis selaku Pendamping Desa Rebono bahwasannya:[6]

> "Yang harus dilakukan dalam proses pendampingan yaitu harus melalui pendekatan emosional dengan calon KRTP".

Berdasarkan wawancara dengan Mbak Nafis bahwasannya dalam proses pendampigan itu harus dilakukan dengan telaten, cermat, intensif, peduli, menjalankannya harus dengan cara kekeluargaan. Soalnya dalam hal ini pendamping desa harus memberikan motivasi terhadap RTS, serta dapat membantu RTS dalam merealisasikan dan pengelolaan dana bantuan. Pendamping desa harus bisa melestarikan program bantuan terhadap RTS. Menurut perkataan dari Mbak Nafis selaku pendamping desa bahwasannya:[7]

> "yang harus dipersiapkan dalam proses pendampingan yaitu: yang pertama lihat kondisi dulu, sebelum ada pendampingan kita membentuk pokmas terlebih dulu, nah pokmas itu tergantung dari letak yang strategis dan kondisi geografis yang ada di Desa Rebono. Untuk di Asem Jajar dan Rebono Timur jadi satu, setelah dijadikan satu kelompok kemudian kita pisahkan antara KRTP yang sudah punya usaha (tinggal pengembanganny saja) sama KRTP yang belum punya usaha. Dari situ kita tahu kelemahan dari masing-masing KRTP, apakah mereka kesulitan dipendanaan atau pas bikin usaha barunya. Jadi kita Pendamping Desa bikin alternatif untuk menyelesaikan itu".

Berdasarkan wawancara dengan Mbak Nafis bahwasannya sebelum melakukan pendampingan, hal yang harus dilakukan yaitu membentuk Pokmas (kelompok masyarakat) khususnya pada KRTP. Pemebentukan

---

[6] Nafis, Wawancara dirumahnya, Pada tanggal 20 Januari 2017, Pukul 15:00 WIB sampai selesai.
[7] Nafis, wawancara dirumahnya, 20 januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok ini berdasarkan kesamaan jenis usaha atau kedekatan rumah tinggal.

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dilaksanakan dengan mengintegrasikan penyadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan, serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Hasanah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya, beliau membuka toko kelontong yang kecil di dalam rumahnya, berikut pemaparannya:[8]

> "Alhamdulillah, bisa dibuat kulak an lagi, dan dagangan tambah rame pembeli juga rame. Kemarin sempat sepi karena dagangan saya sedikit, dan modal buat kulak an lagi tidak ada. Setelah dapat bantuan Alhamdulillah mbak, ada kemajuan dan saya bisa ngirim anak di pondok, dan uangnya diputar buat kulak an lagi."

Ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari:

a. Pelaku atau pelaksana.

   Perempuan tidak lagi sebagai obyek tetapi subyek pembangunan. Misalnya perempuan merupakan pelaku atau pelaksana pembangunan.

[8] Ibu Hasanah, Wawancara dirumahnya, Pada tanggal 20 Januari 2017, Pukul 10.30 WIB sampai selesai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, perempuan terlibat langsung dalam proses pembangunan, misalnya yang terjadi pada Ibu Solihati ini, beliau mendapatkan bantuan dari Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, dan bantuan tersebut berupa modal usaha yaitu membuka kios bensin dan beternak kambing. Berikut paparannya:

> "senang mendapat bantuan karena bisa dibuat makan setiap hari dan membeli kambing untuk dirawat biar ada kesibukan, kambing yang dibeli seharga 1.200.000,- dan sisa bantuan juga dibuat untuk kulak an bensin biar tidak cepat habis, soalnya kalau modal tidak diputar nanti bisa termakan habis. Kadang satu hari satu malam bensin habis dibeli orang yang punya mesin glower (gilingan padi), kadang juga sampai tiga hari. Sehingga sisa bantuan dari pemerintah tetap ada. Kambing yang dibeli itu punya anak dan anaknya dijual seharga 440.000,- yang mana uangnya dibuat beli semen dan gamping untuk melester atau ngalusi lantai rumah, biar anak cucu bisa tidur enak di lantai. Hasil yang dari bensin itu dibuat makan dan tetap jalan hingga sekarang, karena khawatir dihukum kalau tidak bisa menjalankan modal secara benar. Bahkan pak moden pernah bertanya, dari mana modal jual bensin ini? Jawabnya: ya dari sumbangan tadi pak".[9]

b. Pengendali

Dalam hal ini, Pendamping Desa sebagai pengendali atau yang mengawasi jalannya modal usaha sebagai pembangunan ekonomi pada setiap anggota KRTP. Pendamping Desa akan terus memantau perkembangan KRTP dan memfasilitasi pengembangan sosial ekonomi anggota KRTP. Menurut pemaparan dari Mbak Nafis selaku pendamping Desa:

> "Untuk di asem jajar atau rebono timur jadi satu, setelah dijadikan satu kelompok kemudian kita pisahkan antara KRTP yang sudah punya usaha

[9] Solihati, Wawancara dirumahnya, Pada tanggal 27 Januari 2017, Pukul 11:00 WIB sampai selesai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> (tinggal pendampingan) sama KRTP yang belum punya usaha. Dari situ kita tahu masing-masing kelemahan dari setiap KRTP, apakah mereka kesulitan dari pendanaan atau pas bikin usaha barunya. Jadi kita bikin alternative untuk menyelesaikan itu."

c. Pengambil keputusan

Dalam proses pembangunan, Pengambilan keputusan yang terjadi disini yaitu mengenai jenis usulan kebutuhan melibatkan partisipasi aktif rumah tangga sasaran dengan mengajak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan meningkatkan taraf hidup. Pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*) manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris KRTP untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki. Menurut Ibu Sumaidah dalam percakapannya sebagai berikut:

> "Pertama kali di adakan pendataan pada tahun 2014, verifikasi apakah orang yang akan mendapatkan bantuan atau sasaran ini benar-benar miskin atau janda, sama ada penyuluhan terkait dengan dana bantuan yang akan di terima nantinya, bahwa bantuan yang akan diterima berupa modal usaha, jadi setiap RTS ditanyakan nantinya akan membuka usaha apa? Dalam pendataan ini juga ada dokumentasi yang nantinya akan dikirim ke pemerintah provinsi. Kendalanya disini bagi RTS yang tidak bisa membuka usaha, solusi dari pemerintah desa, ditanyakan bisanya apa? Saya bisanya dalam peternakan, akhirnya RTS tersebut beternak kambing."

d. Penasehat.

Penasehat disini, dilakukan oleh Kepala Desa, dan Sekretariat Desa. Kepala Desa disini selaku pemegang tanggung jawab penuh atas terealisasikannya Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Jalin Matra. Menurut Ibu Sumaidah dalam paparannya sebagai berikut:

> "Yang bertanggung jawab secara keseluruhan ya kepala desa, kepala desa sebagai penanggung jawab dalam hal ini."

e. Penerima manfaat pembangunan

Hasil pembangunan dari program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ini manfaatnya bisa dirasakan pada setiap anggota KRTP. Bantuan Program Jalin Matra ini diharapkan modal tersebut tepat manfaat dan tepat sasaran kepada setiap anggota KRTP. Paparan dari Mbak Nafis selaku pendamping desa sebagai berikut:

> "Cuma kendalanya pada mereka yang tidak punya usaha, untuk menciptakan usaha baru itu. Tapi kalau yang sudah punya usaha kurang pengembangannya kita gak ada masalah apa-apa, cuma tinggal pendampingannya aja untuk mereka karena mereka udah pinter untuk mengelola usahanya sendiri, cuma kekurangannya hanya pada modal, makanya dengan adanya bantuan ini diharapkan modal itu tepat manfaat dan tepat sasaran kemereka."

Pendekatan yang dipakai disini, dalam program jalin matra penanggulangan feminisasi kemiskinan yaitu pendekatan GAD *(Gender And Development)*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat perempuan sebagai subyek pembangunan, agen perubahan dengan menitikberatkan pada pola hubungan yang setara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini, lebih bersifat *Bottom Up*, sehingga pengalaman dan pemahaman yang berasal dari perempuan menjadi *entry point* dari proses pembangunan. Kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki dalam wujud persamaan hak, kedudukan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan, peranan, kesempatan yang sama dalam pembangunan di segala bidang kehidupan menjadi modal utama adanya kesetaraan gender, sehingga baik jenis maupun imbalan kerja akan diberikan kepada laki-laki maupun perempuan secara proporsional. Seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Hasanah dan Ibu Solihati, beliau membuka usaha berdagang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam keluarganya.

Pada periode 1970-an, Diana Pearce pernah mengajukan konsep tentang feminisasi kemiskinan dalam tulisannya berjudul "*The Feminization of Poverty: Women, Work and Welfare*". Feminisasi kemiskinan merujuk pada adanya kenyataan sebagian besar warga miskin berjenis kelamin perempuan. Dalam pandangan Diana, salah satu faktor utama kemiskinan yang menimpa kaum perempuan adalah karena terpisahnya mereka dari suami atau pasangannya, entah karena faktor kematian, tetapi yang seringkali terjadi adalah karena sebab perceraian.

Ada dua dampak yang mungkin muncul dengan faktor ini. Di satu sisi, perempuan tersebut mendapat "kebebasan" untuk memilih lapangan kerja. Tetapi di sisi lain, kemungkinan terbesar adalah terjadinya pemiskinan (*pauperization*) dan ketergantungan dalam memperoleh kesejahteraan. Persoalan kemiskinan yang dihadapi perempuan sejatinya tidak sama dengan laki-laki. Dalam konteks tersebut, Diana Pearce mengeksplorasi dua aspek yakni adanya perbedaan dalam sumber pendapatan yang mungkin menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebab kemiskinan perempuan dan sistem jaminan kesejahteraan terutama bagi perempuan miskin. Dalam ungkapan Ibu Sumaidah selaku perangkat desa bahwasannya:[10]

> "Faktor yang menyebabkan perempuan itu menjadi kepala rumah tangga di Desa saya yaitu: suami meninggal atau janda, jadi program jalin matra kalok ada suami yang bantu gak bisa mbak, di cabut. Trus ada suami yang sakit menahun otomatis yang harus bekerja kan si istri itu dapat bantuan mbak, soalnya disini ada suami yang jatuh sakit menahun dan buta tapi cuma satu rumah tangga. Jadi di desa saya mayoritas yang dapat bantuan itu karena faktor suami meninggal atau janda, Cuma satu orang saja yang suaminya jatuh sakit bertahun-tahun dan buta itu si istri dapat bantuan".

Adapun dari penyajian data yang telah peneliti paparkan di atas, apabila peneliti analisis bahwa bentuk partisipasi yang terjadi secara garis besar, tentang Partisipasi Perempuan Dalam Konteks Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Dalam Program Jalin Matra di Desa Rebono yaitu partisipasi perempuannya dilihat dari pembentukan pokmas (kelompok masyarakat) dari sini kita tahu bahwa didalam kelompok terjadi diskusi antara anggota KRTP dengan Pendamping Desa. Yang mana anggota KRTP disini bisa mengeluarkan pendapatnya atau berbicara mengenai ususlan kebutuhan, berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup. Dari sini Pendamping Desa bisa menampung semua aspirasi atau usulan kebutuhan masyarakat. Jadi

[10] Sumaidah, Wawancara dirumahnya, Pada tanggal 27 Januari 2017, Pukul 13:00 WIB sampai selesai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendamping desa membuat alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kegiatan pembentukan kelompok ini dilakukan melalui pertemuan calon Rumah Tangga Sasaran dengan agenda: menyepakati pembentukan kelompok, menyepakati nama-nama anggota dan nama kelompok, menetapkan ketua dan bendahara, serta menyepakati rencana tindak lanjut.

Dari temuan data dan analisis peneliti apabila direalisasikan menggunakan tangga partisipasi miliknya Shery Arstein masuk pada kategori *Tokenisme* yaitu pada tahap ini bukan hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar. Masyarakat disini juga mempunyai hak untuk memberikan suara, melalui pengambilan keputusan, tentang jenis usulan kebutuhan mereka, dan aspirasi atau pendapat mereka diterima oleh Pemerintah Desa.

Dari pemaparan di atas bahwa partisipasi perempuan dalam konteks penanggulangan feminisasi kemiskinan dalam program jalin matra di Desa Rebono, partisipasinya terjalin cukup mendukung. Sedangkan dari anggota PKK di Desa Rebono, dengan Pendamping Desa saling berkesinambungan yaitu sama-sama memantau perkembangan KRTP. Intinya pemerintah desa Rebono membantu dalam berpartisipasi atau pro aktif terhadap program yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Adapun partisipasi masyarakat yang hadir dalam rembug warga ditunjukkan dalam Absensi Daftar Hadir Rembug

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Warga Program Jalin Matra PFK Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, yang ditunjukkan dalam halaman lampiran.

Peneliti tidak hanya memiliki hasil dari wawancara, tetapi peneliti juga menemunkan hasil dari pengamatan langsung yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Kegiatan Rembug Pokmas, dalam rangka pencairan bantuan KRTP. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Rebono, yang dihadiri oleh Sekretariat Desa, Pendamping Desa, Pemerintah Desa, Pendamping Kabupaten, Pemerintah Kecamatan. Pencairan bantuan dilaksanakan dalam kegiatan Rembug Kelompok KRTP yang dihadiri oleh KRTP secara langsung. Penyerahan bantuan pada setiap KRTP didokumentasikan disertai bukti tanda terima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Upaya Pemerintah Untuk Menangani Kemiskinan Perempuan, Terutama Bagi Rumah Tangga Yang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).

Kebijakan Pemerintah mengenai penerapan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional, berawal dari kesadaran adanya ideologi gender dan pergeseran paradigma untuk menyusun perubahan struktural relasi gender, maka GAD menjadi strategi dan pendekatan dalam Pembangunan Nasional. Melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dimulailah pengarusutamaan gender/ PUG (*gender mainstreaming*) (*Ministry of Women's Empowerment Republic of Indonesia, 2002*), yang merupakan: "pendekatan untuk mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan pengalaman dan masalah perempuan maupun laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan keamanan dan kemasyarakatan".

Adapun tindakan dari Pak Dhofir selaku kepala Desa Rebono dalam menangani feminisasi kemiskinan yang ada, yaitu dengan cara:[11]

> "dengan cara yo membagikan, membantu pemerintah dalam menjalankan program jalin matra. Intinya pemerintah desa membantu dalam berpartisipasi atau pro aktif terhadap program pemerintah provinsi yang mengeluarkan program jalin matra. Soalnya disini pemerintah desa sebagai penyalur dari pemerintah provinsi, Cuma kita membantu dalam melaksanakan atau

[11] Pak Lurah, Wawancara dirumahnya, Pada tanggal 4 nopember 2016, Pukul 11:15 WIB sampai selesai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensukseskan program jalin matra. Semua danakan dari pemerintah provinsi".

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak lurah bahwasannya upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa guna menangani masalah Feminisasi Kemiskinan yang ada di Desa Rebono yaitu dengan cara membatu Pemerintah Provinsi dalam menjalankan Program Jalin Matra. Program Jalin Matra merupakan sebuah wadah guna mengatasi masalah Feminisasi Kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Rebono turut berpartisipasi dalam Program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa marupakan sebuah penyalur dari program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.

Sedangkan Progres Kegiatan Tingkat Desa, di Desa Rebono pelaksanaan kegiatannya antara lain:

- Pra rembug warga
- Klarifikasi penerima bantuan
- Pendalaman kebutuhan KRTP
- Bimbingan teknis
- Pengelolaan usaha
- Pelestarian dan keberlanjutan program
- Rembug warga
- pembentukan pokmas
- pengajuan pencairan dana
- realisasi bantuan KRTP
- pertnggungjawaban

Untuk penjelasan masing-masing pelaksanaan kegiatan penanggulangan feminisasi kemiskinan ada pada Bab 3, yang proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penanggulangan feminisasi kemiskinan.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa dalam rangka Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan baik itu yang peruntukannya untuk biaya operasional (BOP) Sekretariat Desa dan Pendamping Desa maupun Bantuan kepada KRTP harus tercantum dalam APB Desa. Untuk itu apabila bantuan keuangan dimaksud belum tercantum dalam APB Desa, harus dilakukan perubahan dengan mengacu pada permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 34, ayat (1): Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB-Desa. Sedangkan pada ayat (2): perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.[12]

Langkah-langkah pencairan dana bantuan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, adalah sebagai berikut: menurut pemaparan Bapak Hamse

> "langkah-langkah dalam pencairan dana bantuan yang harus dilakukan yaitu: melalui rembug pendalaman usaha, apakah ada perubahan dalam ususlan kebutuhan soalnya pada tahun 2014 ada usulan kebutuhan, takutnya pas

[12] Pedoman Teknis Operasional Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan th 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> waktu pencairan ada yang mau ganti, setelah itu bikin rekening pokmas karena uang APBD masuk ke rekening Desa jadi setiap pokmas harus mempunyai rekening, nanti uang yang masuk ke rekening desa di transfer ke rekening pokmas. Itu yang ngambil ketua sama bendahara pokmas, ada yang ditransfer ke rekening pendamping desa, ada juga yang direkening pokmas. Setelah itu ada pengambilan pencairan, setelah pencairan langsung dibelanjakan. Jadi ketua sama bendahara pokmas Cuma tanda tangan kalau mau ngambil uang, tapi yang membelanjakan tetap pemerintahan desa bersama dengan sekretariat desa".[13]

**Penganggaran**

Anggaran Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa. Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah kabupaten yang dipergunakan untuk:

a. Honorarium bagi Tim Sekretariat Kabupaten (termasuk Honorarium Tim Fasilitas Kecamatan) maksimal sebesar 30%
b. Biaya Operasional Sekretariat Kabupaten minimal sebesar 70% dipergunakan antara lain untuk: sosialisasi, pembinaan, ATK, rapat koordinasi, pelaporan, dokumentasi, publikasi, monitoring evaluasi dan tidak diperkenankan untuk belanja modal.

Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah KRTP dikalikan Rp. 2.500.000,- ditambah biaya operasional (BOP) Desa dan 5% dari total bantuan pada KRTP dalam satu Desa untuk operasional dan

[13] Hamse, Wawancara dirumahnya, Pada tanggal 27 januari 2017, Pukul 08.30 WIB sampai selesai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

insentif pendamping desa. Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah Desa dipergunakan:

a. Bantuan KRTP masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- kali seluruh KRTP dalam satu desa.
b. Biaya operasional Sekretariat Desa dipergunakan dengan perincian sebagai berikut: honorarium anggota secretariat desa sebesar maksimal 30%., biaya fasilitas operasional kegiatan meliputi: kegiatan rembug warga, fasilitas pembukaan, rekening kelompok KRTP, rapat-rapat fasilitas KRTP, bantuan transport/biaya perjalanan dalam rangka Jalin Matra PFK, ATK, dokumentasi, sepanduk, monitoring dan evaluasi serta pelaporan minimal 70%.
c. Inensif pendamping Desa dan operasional fasilitas kegiatan ditingkat pokmas KRTP sebesar 5% dari total bantuan pada KRTP dalam satu Desa.

Bantuan kepada KRTP dipergunakan untuk:

a. Kegiatan usaha ekonomi produktif meliputi modal investasi berupa sarana prasarana usaha dan modal kerja minimal 70%
b. Kegiatan usaha pendukung misalnya pertanian karangkitri (rumah pangan lestari), usaha ternak kecil dan perikananmaksimal 30%.
c. Apabila dipandang perlu dapat dialokasikan untuk pemnuhan kebutuhan dasar berupa sarana dan prasarana atau kebutuhan dasar untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kualitas hidup KRTP sehari-hari maksimal 10% dari total bantuan KRTP.

pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan tempat dan perlengkapan untuk Sekretariat Desa serta melanjutkan pembinaan atau pemantauan pasca program dengan melibatkan Tim Penggerak PKK.

Berikut adalah hasil analisis dari para informan yang telah digabungkan dengan teori:

**Tabel 4.1 Hasil Analisis dengan Teori**

| No | Informan | Data | Teori |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Dhofir (kepala desa Rebono) | Pemdes membantu dalam berpartisipasi terhadap program Pemprov yang mengeluarkan program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, yang mana bantuan tersebut berupa modal usaha, untuk meningkatkan pendapatan keluarga. | Human Capital karena ada hubungan erat antara pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. |
| 2 | Sumaidah (perangkat desa Rebono) | Faktor yang menyebabkan perempuan itu menjadi kepala rumah tangga yaitu: suami meninggal atau janda, dan suami sakit bertahun-tahun dan buta. | konsep tentang feminisasi kemiskinan, karena Feminisasi kemiskinan merujuk pada adanya kenyataan sebagian besar warga miskin berjenis kelamin perempuan. Dalam pandangan Diana, salah satu faktor utama kemiskinan yang menimpa kaum perempuan adalah karena terpisahnya mereka dari suami atau pasangannya, entah karena faktor kematian, tetapi yang seringkali terjadi adalah karena sebab perceraian. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Menurut pemaparan ibu Sholihati (KRTP) | Perempuan tidak lagi sebagai obyek tetapi subyek pembangunan. Misalnya perempuan merupakan pelaku atau pelaksana pembangunan. | Konsep partisipasi perempuan dalam pembangunan karena dalam perkembangannya pembangunan dilaksanakan dan direncanakan tanpa mempertimbangkan masalah gender. Sedangkan dalam program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dilaksanakan dengan kepedulian gender, tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis saja, tetapi oleh lingkungan, ekonomi, sosial, budaya. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id